

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual. Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Saidin¹ Hak Cipta merupakan hak benda *immateriil* yang dimaksud dengan hak milik *immateriil* adalah hak milik yang objek haknya adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud, sehingga dalam hal ini bukan fisik atau wujud dari suatu benda atau barang yang di hak ciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta. Oleh karena kata harta benda/properti mengisyaratkan adanya sesuatu benda nyata. Padahal Hak Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda materil. Ia merupakan hasil kegiatan daya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.

¹ Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 8

Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan adanya peraturan terhadap Hak Cipta tersebut membuktikan bahwasanya Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan demi keuntungan seseorang. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai persyaratan untuk melakukan penyiaran yang bertujuan secara komersil terhadap karya cipta milik pemegang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 2014 menjelaskan pengertian dari Lembaga Manajemen Kolektif “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) merupakan salah satu dari beberapa Lembaga Manajemen Kolektif berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti yang diakui eksistensinya oleh Kementerian Hukum

dan HAM yang dibentuk guna mengurus hak cipta lagu. YKCI yang sering disingkat dengan KCI (Karya Cipta Indonesia) didirikan pada tanggal 12 Juni 1990 oleh para pencipta lagu dan para musisi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rakaman Indonesia) beserta dengan dukungan para sarjana hukum yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan hak cipta yang didasarkan kepedulian atas nasib para Pencipta serta para musisi Indonesia yang pada saat itu banyak dirugikan dengan banyaknya kasus pelanggaran hak cipta.

Beberapa waktu lalu terdapat kasus tentang pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh PT Vizta Pratama, perusahaan pemegang *franchise* rumah bernyanyi (karaoke) Inul Vizta, menjadi tersangka atas kasus pelanggaran hak cipta. PT Vizta Pratama, perusahaan pemegang *franchise* rumah bernyanyi (karaoke) Inul Vizta, menjadi tersangka atas kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini bukan kali pertama karaoke Inul Vizta tersandung masalah. Pada 2009, Andar Situmorang pernah mengajukan gugatan kepada Inul Daratista sebagai pemegang saham terbesar PT Vizta Pratama yang menaungi *outlet* karaoke Inul Vizta. Andar mengajukan gugatan materi Rp5,5 triliun karena 171 lagu ciptaan komponis nasional, (alm) Guru Nahum Situmorang berada di 20 outlet Inul Vizta tanpa izin. Gugatan yang diproses di Pengadilan Negeri Tata Niaga Jakarta Pusat akhirnya dimenangkan Inul.

Pada 2012, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengadukan Inul Vizta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait lisensi penggunaan lagu.

Namun, oleh pihak pengadilan, gugatan tersebut ditolak karena salah konsep. Pada akhirnya, KCI dan Inul sepakat berdamai. Pada Januari 2014, band Radja melaporkan Inul Vizta ke Mabes Polri karena dianggap menggunakan lagu "Parah" tanpa izin. Inul terancam hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp5 miliar karena diduga melanggar UU No. 19 th 2002 tentang Hak Cipta.² Dengan adanya contoh kasus di atas membuktikan bahwa sampai saat ini perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan lembaga *collecting society* atau biasa disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang ada masih jauh dari yang diharapkan.

Selanjutnya, di negara maju hal ini akan menjadi perhatian serius oleh pemerintah setempat dan tidak segan memberikan sanksi jika memang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta. Para pelaku pembajakan terhadap hak cipta, apabila dibiarkan terus menerus tanpa tindakan serius dari negara melalui aparat penegak hukumnya, nantinya akan membuat hal tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan sebuah pelanggaran hukum. Bagi para pencinta lagu, keadaan tersebut makin menumbuhkan sikap pesimis dan sangat menurunkan gairah mencipta. Karena akan hilangnya minat dalam profesi mereka untuk menciptakan lagu-lagu yang bagus diakibatkan banyaknya pelanggaran Hak Cipta.³

² Metronews, 17 Maret 2015 15:04 WIB, *Inul Vizta Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta* dalam <http://hiburan.metrotvnews.com/read/2015/03/17/372545/inul-vizta-jadi-tersangka-pelanggaran-hak-cipta>, di akses pada 18 Mei 2015 Pukul 21:35

³ Tiyas Maheni DK, 2010, "Penerapan Delik biasa Terhadap Hak Cipta", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, Semarang: Politeknik Negari Semarang, hal. 45.

Begitu pentingnya keberadaan Hak atas Kekayaan Intelektual inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengetahui peran dari Karya Cipta Indonesia sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang ditunjuk oleh mayoritas beberapa pencipta dan bentuk perlindungan hukum bagi hak cipta lagu menurut Undang-Undang tentang Hak cipta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan karya ilmiah ini. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KCI sebagai badan hukum kolektif dalam menangani perlindungan hak cipta lagu?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak cipta lagu beserta sebab-sebabnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran KCI sebagai Lembaga Manajemen Kolektif dalam perlindungan hak cipta lagu.
2. Mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta khususnya perlindungan terhadap hak cipta lagu oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia.
3. Mengetahui bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta suatu lagu beserta sebab terjadinya pelanggaran.

D. Manfaat Penelitian

Selain itu manfaat dari penelitian yang diperoleh dari penelitian ini di antaranya:

1. Teoritis

Untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perlindungan terhadap hak cipta lagu pada khususnya.

2. Praktis

- a. Sebagai bahan kajian bagi pihak pengguna lagu yang menjalankan kegiatan komersil dengan menggunakan pemanfaatan karya cipta lagu, pemerintah dan masyarakat dalam mengetahui hukum terhadap hak cipta lagu agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang.
- b. Untuk menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat bagi setiap mahasiswa hukum Strata-1 dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴

Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepskan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,

⁴Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3.

melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan makna-makna simbolik dari perilaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antara mereka.⁵

Untuk dapat menemukan data yang ada pada penelitian ini, maka perlu menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba untuk melihat keterkaitan antara faktor hukum dengan penerapannya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan hukum yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, diantaranya:

- a. Pelaksanaan penggunaan suatu Karya Cipta secara komersial.
- b. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap suatu Karya Cipta lagu oleh KCI sebagai badan hukum kolektif.

⁵Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal.1 dan 3

⁶Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 17

- c. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan penggunaan suatu Karya Cipta lagu secara komersial.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga badan hukum kolektif KCI Jawa Tengah yang berkantor di Kota Semarang.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata⁷, dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah staff atau kru pada lembaga manajemen kolektif Karya Cipta Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan Karya Cipta berupa lagu secara komersial.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan berasal dari dokumen-dokumen tertulis, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga yang terkait diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

⁷ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung Hal. 112

- 2) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti;
- 3) Kamus (hukum) dan media internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar maka dalam pengumpulannya akan menggunakan pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berisikan tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan terkait penggunaan Karya Cipta lagu secara komersial dan peran Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga manajemen kolektif dalam perannya yang akan dijawab oleh orang yang diwawancarai untuk mendapatkan data.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis sebagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada awal tahap, akan dilakukan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara: mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundangan-undangan, dan data-data sekunder lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya, kemudian akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan

dan berbagai situasi. Kedua cara tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, dan daftar pertanyaan.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis interaktif. Analisis digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti ketika data telah dikumpulkan dan setelah itu peneliti membuat sebuah kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitiannya.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian, disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pertama, pada BAB I memuat tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Kedua, pada BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari 3 sub bab. Yang pertama adalah menguraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta yang berisikan Pengertian Hak Cipta, Sifat, Subjek dan Objek Hak Cipta. Yang kedua adalah Tinjauan Umum Karya Seni Lagu berisikan Pengertian Karya Seni Lagu dan pengelompokan dari Musik atau Karya Seni Lagu, dan Macam-Macam bentuk pelanggaran terhadap hak cipta lagu. Yang ketiga adalah Tinjauan Umum Tentang KCI sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang berisikan Pengertian KCI, Tujuan dari KCI, Fungsi dari KCI, dan Tugas dari KCI.

Ketiga, pada BAB III berisikan pembahasan dan penelitian dari Peran KCI dalam perlindungan Hak Cipta lagu yang digunakan secara komersial dan bentuk pelanggaran beserta sebab-sebabnya.

Keempat, pada BAB IV ini memuat mengenai kesimpulan dan saran sebagai penutup.